

# PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT MINORITAS

Wahid Khozin

## **Abstract**

*The research undertaken in one of regencies with Moslem minority is aimed at understanding the condition of religious educational institutions, religious values taught and community expectation with respect to religious education in the future. The research findings show that numerous components of religious educational institutions, including their numbers, were so insufficient. The types of religious educations provided were oriented to the cultivation of religious principles such as faith-morals, daily prayers, and al-Quran reading and writing. Community expected that religious education in the future be increased both in their quantity and the quality of the materials transferred.*

**Keywords:** *religious education, muslim minority, religious values.*

---

Lahir di Purworejo, 5 Juli 1963.  
Menamatkan SD, SMP dan SMA di  
Purworejo, selanjutnya meraih gelar  
sarjana S1 dari IAIN Syahid Jakarta dan S2  
dari Prog. Sosiologi Universitas Indonesia.  
Pemred Jurnal EDUKASI dan Peneliti pada  
Puslitbang Pendidikan Agama dan  
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat  
Depag RI.

## PENDAHULUAN

Pelayanan pendidikan keagamaan\* sudah dirancang sangat optimal, tidak saja mendorong anak-anak peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang cerdas, kreatif dan dinamis, tapi juga diharapkan mereka menjadi manusia yang memiliki integritas keimanan dengan konsistensi artikulasi ketaqwaan yang kuat.<sup>1</sup> Bukan hanya itu, negara juga telah memfasilitasi agar semua warga negara memperoleh layanan pendidikan agama dan diberikan oleh guru yang seagama. Bersamaan dengan itu, negara memfasilitasi rakyatnya untuk mempelajari agama secara mendalam, melalui pendidikan keagamaan, sehingga, tidak saja cukup untuk membekali diri mereka dalam upaya mencapai kualifikasi ketaqwaannya yang ideal, tapi juga bisa menjadi ahli agama yang dapat memberikan layanan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan ke-

agamaan kepada masyarakat melalui pendidikan non formal sebagai wujud dari prinsip pendidikan sepanjang hayat.<sup>2</sup>

Persoalan pelayanan pendidikan (agama dan keagamaan) akan melibatkan banyak unsur dimana satu sama lainnya harus bisa memiliki pemahaman yang sama. Unsur-unsur besar yang masih belum padu adalah Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pemerintah Daerah memiliki tugas menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup> Dan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Kenyataan di lapangan, belum semua Pemerintah Daerah bisa memperlakukan dengan adil terhadap urusan pendidikan terutama pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan ter-

---

\*EDUKASI Vol. 4 No. 4 Tahun 2006 pernah memuat hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang pelayanan pendidikan keagamaan (studi kasus di Tapanuli Utara, Sumut), namun bukan deskripsi nasional - Red.

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah disampaikan paa Workshop "Pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan", Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta-Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 27 Juli 2005

<sup>2</sup> Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 30 (2) Undang Undang NO. 20 tahun 2003 tentang Ssistem Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> Undang Unadang Nomor 32 (2) Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Untuk urusan wajib Pemerintah daerah lihat pasal 13 dan 14.

jadi diskriminasi perlakuan yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan.<sup>4</sup>

Kenyataan lain di lapangan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara multi etnis, multi bahasa, multi budaya dan multi agama. Dari sisi etnis terdapat kurang lebih 1000 etnis atau sub etnis tersebar di wilayah Indonesia ini<sup>5</sup>. Dari sisi agama terdapat lima agama yang diakui negara sebagai agama resmi (dan masih banyak lagi agama-agama yang belum diakui negara), juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan keanekaragaman bahasa dan budayanya. Keadaan ini harus disadari menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan satu sama lainnya. Hal lain yang juga harus dicermati adalah penyebaran secara kuantitatif antar etnis, bahasa, budaya dan agama juga tidak selaluimbang. Di sini yang kemudian memunculkan apa yang disebut mayoritas-minoritas. Penyebaran yang tidak selaluimbang tersebut mempunyai implikasi terhadap

pemerataan pendidikan dimana belum seluruh rakyat Indonesia melek huruf. Khusus yang terakhir, menuntut dilakukannya penelitian guna mengetahui sejauh mana pelayanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat minoritas. Untuk itulah Puslitabang Pendidikan Agama dan Keagamaan merasa tertantang untuk melihat lebih jauh realitas pelayanan pendidikan keagamaan di daerah minoritas tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana implementasi pelayanan pendidikan keagamaan baik yang diberikan oleh lembaga pondok pesantren maupun Madrasah Diniyah. Hal lain yang ingin dikaji adalah apa saja bentuk pelayanan pendidikan keagamaan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana implementasi pelayanan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas; 2) bagaimana bentuk-bentuk

---

<sup>4</sup> Lihat Husni Rahim. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, hh. 50-51. Kutipan ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan (termasuk lembaganya; madrasah dan pesantren) sejak zaman penjajahan tidak pernah mendapat bantuan, malah selalu diawasi dan dihambat perkembangannya. Menurut catatan Husni Rahim, perlakuan diskriminasi itu tertuang dalam Ordonansi Guru th. 1905 No. 550, dan Ordonansi Guru th. 1925.

<sup>5</sup> M Ainul Yaqin, M.Ed. 2005. *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, h. 206

pelayanan pendidikan keagamaan yang diberikan kepada masyarakat minoritas; 3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan 4) apa saja harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas.

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat terhadap dua hal; pertama, secara akademik diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian dan memperkaya pengetahuan tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan di masyarakat minoritas, mengingat kajian-kajian yang telah dilakukan lebih diarahkan pada relasi mayoritas-minoritas, dan kedua, secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan inspirasi dalam menentukan arah pemecahan masalah. Di samping itu, bisa juga dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di masyarakat minoritas.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini berjudul *Pelayanan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat Minoritas*. Tetapi karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan sumber daya maka fokus kajian dibatasi pada

hal-hal seperti berikut ini: (1) Pelayanan pendidikan keagamaan yang dimaksudkan adalah bagaimana penyelenggaraan (sarana, kepemimpinan, organisasi, ketenagaan, kurikulum, siswa dan output), bentuk pendidikan keagamaan, jenis pendidikan keagamaan, hambatan dalam penyelenggaraan, harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. (2) Masyarakat minoritas dibatasi dalam dua pengertian, *pertama*, minoritas dalam konteks jumlah. Artinya, penelitian dilakukan pada lingkungan masyarakat muslim yang secara kuantitas lebih kecil dibanding komunitas agama lain. *Kedua*, minoritas dalam arti ekonomi. Yaitu lingkungan masyarakat yang secara ekonomi tertinggal dibanding daerah lain sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan. (3) Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep yang dipergunakan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 30 ayat (4) yaitu diniyah dan pesantren.

Penelitian ini dilakukan di sebelas (11) propinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kali-

mantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku

## HASIL PENELITIAN

### Kondisi Umum

#### *Kelembagaan*

Secara kelembagaan, kehadiran lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas dilatarbelakangi oleh keinginan kuat dan semangat yang tinggi para tokoh masyarakat yang dipicu oleh kekhawatiran akan melunturnya akidah di kalangan anak-anak, pelajar dan generasi muda pada umumnya yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kondisi ini dirasakan hampir di semua kota besar sasaran penelitian. Secara khusus memang pendidikan keagamaan memiliki tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Di Medan misalnya, terdapat kekhawatiran terhadap merebaknya pemurtadan di kalangan muslim Mereka merasa perlu membentenginya melalui pendidikan keagamaan. Hal serupa juga ditemukan di Manado, tepatnya Kota Bitung yang masyarakat muslimnya berkisar 39 persen. Ada misi yang diemban di Bitung yaitu menjaga akidah Islam generasi muda. Sementara di Kalimantan Tengah lebih kepada alasan kelembagaan, misalnya lembaga

pendidikan keagamaan didirikan karena tidak adanya lembaga pendidikan Islam. Di Maluku, lembaga pendidikan keagamaan hadir dipicu dari dampak konflik antar golongan dan agama. Maksudnya, konflik telah memisahkan secara tajam antara kelompok muslim dan non muslim. Yang lainnya didasari untuk menjaga nilai-nilai Islam. *Kedua*, secara ideal, masyarakat mengharapkan ada lembaga yang dapat menjadi wadah untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, mempunyai pondasi akidah akhlak yang kokoh, dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga generasi muda dapat menangkai berbagai pengaruh umat mayoritas yang selalu berhadapan di setiap saat.

Dari sisi kuantitas, lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas menunjukkan variasi. Artinya walaupun masyarakat muslim minoritas, tetapi lembaga pendidikan keagamaan masih ada yang secara kuantitas begitu banyak. Di Maluku misalnya, jumlah lembaga pendidikan keagamaan mencapai 25 buah. Kondisi ini berbeda dengan di Manado atau di Medan (Tarutung) yang masing-masing hanya 5 buah dan 3 buah. Sementara jika dilihat

dari sisi peserta didik, masing-masing lembaga pendidikan keagamaan berkisar antara 50–300 orang. Di masyarakat minoritas luar Jawa, jumlah peserta didik hampir tidak ada yang mencapai 100 orang. Keadaan ini sangat bisa difahami karena memang kondisi masyarakat muslim minoritas.

Lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas muncul karena kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Siapapun orangnya boleh dan bisa mendirikannya, tidak ada peraturan perundangan yang membatasinya. Maka, status kepemilikan Madrasah Diniyah menjadi bervariasi, dalam arti sudah ada yang berada di bawah naungan yayasan, perkumpulan, organisasi masyarakat, tapi ada juga --dan ini sebagian besar-- berada di bawah kepemilikan perorangan.

Dari sisi sejarah berdirinya, relatif bervariasi. Ada yang telah memiliki sejarah panjang, tapi ada juga yang masih relatif muda. Di Jawa rata-rata sudah berdiri sejak tahun 1960-an, tetapi di luar Jawa berdiri tahun 1980-an. Di Manado, ada lembaga pendidikan keagamaan milik Al-Khairat, yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an.

Bisa disimpulkan di sini bahwa lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas merupakan lembaga-lembaga kecil yang pada awalnya berupa pengajian, mulai dari pengajian di rumah, mushala, masjid, kemudian dilembagakan. Jika dilihat dari sisi ketenagaan, dapat dijelaskan sedikit sekali lembaga pendidikan keagamaan yang merencanakannya (untuk tidak mengatakan tidak sama sekali). Oleh karena itu, dari sisi ketenagaan ditemukan sangat minim, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas (pendidikan formal). Di Medan, misalnya, salah satu lembaga pendidikan keagamaan hanya memiliki dua orang tenaga. Di Manado, ada yang hanya memiliki tiga, di Maluku demikian juga. Jika ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa tenaga yang hanya dua atau tiga tersebut berasal dari satu keluarga yang memang secara ikhlas menyumbangkan tenaga dan waktu demi masa depan generasi muda muslim.

#### *Jenis Pendidikan*

Jenis-jenis pendidikan keagamaan yang dimaksud adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan keagamaan sasaran penelitian. Maka, di sini

dideskripsikan terbatas pada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini penting karena dengan diketahuinya jenis-jenis pendidikan keagamaan ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna lembaga pendidikan keagamaan. Dari data yang diperoleh di sebelas propinsi, ditemukan jenis pendidikan keagamaan yang hampir sama. Hanya ada beberapa lembaga yang mengajarkan jenis pendidikan agak spesifik seperti di Ambon, Padang, Bali, Banten. Di tempat yang disebutkan ini ada kekhususan seperti tahfidh Qur'an, Barzanzi, dan baca Surat Yasin. Maksudnya bahwa pendidikan keagamaan yang diselenggarakan relatif belum bergerak dari penanaman dasar-dasar agama. Alasan yang dikemukakan oleh para penyelenggara di sebelas lokasi tersebut bahwa materi-materi tersebut adalah materi pelajaran yang wajib diberikan kepada setiap anak muslim dalam mengembangkan pendidikan keagamaan. Dan jenis pendidikan tersebut merupakan jenis pendidikan yang aplikatif untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting terkait dengan salah satu rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari maka ia dituntut

mampu melaksanakannya dengan baik dan benar. Dalam shalat ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang melaksanakannya. Bukankah ritual shalat, bacaan-bacaannya berasal dari al-Qur'an seperti membaca surat al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun shalat atau membaca salah satu ayat-ayat al-Qur'an. Ditambah lagi serangkaian bacaan-bacaan shalat lainnya yang tentu saja menggunakan huruf dan bahasa arab. Begitu juga perbuatan-perbuatan shalat seperti *takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat*, dan lain-lain juga perlu ada pembelajaran.

#### *Harapan*

Harapan adalah ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang dimiliki saat ini, atau keinginan untuk meraih cita-cita. Keinginan yang kuat terkadang dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang kurang diminatinya, semata-mata demi terwujudnya hal-hal yang diinginkannya. Setiap orang memiliki tingkat keinginan sendiri, yaitu tingkat yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya, tingkat harapan yang realistis adalah yang sepadan

dengan kemampuan sendiri dan keadaan seperti ini memberikan peluang yang lebih besar untuk tercapainya hal-hal yang diinginkan. Jika seseorang mempunyai tingkat harapan yang jauh di atas kemampuannya, besar kemungkinan bahwa ia akan gagal dan mengalami frustrasi. Seseorang yang kurang berani menghadapi kegagalan cenderung untuk mempunyai tingkat harapan yang rendah.<sup>6</sup>

Setidaknya kerangka definisi di atas dapat digunakan dalam menggambarkan harapan masyarakat muslim minoritas terhadap pendidikan keagamaan. Dari informan orang tua siswa terlihat ada keinginan dan harapan terhadap lembaga MD. Mereka menginginkan jenis pendidikan agama yang lebih tinggi. Materi yang diberikan masih tingkat dasar sehingga perlu ditingkatkan agar anak-anak bisa secara baik mengamalkan ajaran agamanya. Sementara orang tua lainnya menginginkan agar fasilitas pembelajaran ditingkatkan agar anak didik betah belajar dan bertambah banyak siswa yang masuk. Kelengkapan fasilitas ini menurut harapan mereka, setidaknya bisa mendekati

kelengkapan fasilitas lembaga-lembaga di masyarakat mayoritas agar kualitas pembelajarannya tidak terlalu ketinggalan. Berbeda dengan harapan fasilitas, harapan masyarakat terhadap jenis pendidikan yang diberikan justru mengecil pada ketauhidan. Hal ini ditemukan hampir di seluruh wilayah penelitian dengan alasan mereka setiap hari menghadapi langsung aqidah yang berbeda. Hanya di lembaga pendidikan keagamaan seperti inilah mereka menyerahkan penanaman aqidah anak-anak mereka.

Sementara itu harapan penyelenggara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah terwujudnya jenjang pendidikan keagamaan yang lebih tinggi. Bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang diinginkan tetap TPA dan MD, tapi mempunyai jenjang lanjutan. Terhadap jenis pendidikan yang diberikan, penyelenggara mengharapkan bisa memberikan jenis pendidikan membaca al-Quran, pengajian, belajar shalat, dan bahasa Arab, aqidah, fiqh dan demonstrasi (dari video) seperti demonstrasi menyolatkan jenazah, memandikan jenazah, shalat dan

---

<sup>6</sup>Dikutip dari Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1988. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, h. 373.

seterusnya. Kami kesulitan bahan yang bisa langsung dilihat oleh anak anak. Hal lain yang menjadi harapan penyelenggara adalah berkaitan dengan kelengkapan fasilitas. Menurut para penyelenggara, kelengkapan fasilitas merupakan daya tarik bagi anak untuk tetap semangat belajar. Harapan penyelenggara yang paling kuat dan menjadi harapan di seluruh wilayah adalah agar disediakan ketenagaan terutama guru sekaligus insentif bagi mereka.

Dari masyarakat yang terdiri dari tokoh, ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan perkumpulan pengajian, terungkap harapan bahwa jenis pendidikan keagamaan yang sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas utama adalah pendalaman/penanaman nilai-nilai agama terutama dalam bidang *akidah* yang kuat, karena dengan penanaman akidah yang kuat diharapkan umat Islam dapat membentengi imannya di tengah-tengah kehidupan. Kemudian juga pendidikan baca tulis al-Qur'an, praktek ibadah (shalat, puasa, zakat, haji) dan sebagainya. Hal yang lebih penting juga jenis pendidikan keagamaan diajarkan adalah perlunya penanaman nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basariyah (ke-

salehan lokal/sosial) di kalangan warga muslim. Melalui pemahaman nilai-nilai kesalehan sosial ini diharapkan masyarakat muslim lingkungan minoritas dapat memahami perbedaan yang ada sehingga dapat memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa, sesama warga Indonesia. Di samping itu, juga agar umat Islam lebih bijaksana dalam menyampaikan ajarannya di lingkungan mayoritas.

Berkaitan dengan harapan masyarakat minoritas Islam pada umumnya menginginkan anak mereka menjadi anak yang baik dan beriman serta memiliki ilmu yang banyak tentang Islam. Masih cukup kuat keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan keagamaan agar menjadi muslim yang sejati dan memiliki iman dan taqwa kepada Allah, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Demikian harapan masyarakat secara umum di wilayah penelitian.

### **Analisis**

Studi tentang masyarakat minoritas-mayoritas sebenarnya telah dilakukan sejak dekade 1950-an dan 1960-an.<sup>7</sup> Pada dekade 1950-an, perhatian diawali adanya keter-

tarikan para ahli politik di Barat untuk mulai meneliti pengaruh formasi negara bangsa di negara-negara yang baru merdeka terhadap pergeseran dan pengelompokan etnik di wilayah geografisnya. Pada tahun 1960-an, muncul negara-negara baru merdeka dimana isu-isu nasionalisme begitu didengungkan. Isu ini (nasionalisme) sekaligus menggerogoti identitas etnis, ras dan bahkan agama di masing-masing negara baru itu. Proses ini oleh Azra disebut sebagai pembongkaran batas-batas etnis oleh nasionalisme dan regionalisasi yang membentuk negara-bangsa yang akhirnya memicu lahirnya golongan mayoritas dan minoritas.

Studi M Ali Kettani yang diberi kata pengantar oleh Azyumardi Azra ini barangkali merupakan studi paling komprehensif berkaitan dengan tema minoritas muslim di dunia dewasa ini. Studi ini dilakukan di berbagai negara seperti Eropa, Uni Soviet, China, India, Afrika, Amerika, Pasifik dan di bagian Asia lainnya. Kettani, mendefinisikan minoritas dikaitkan

dengan istilah muslim, sehingga minoritas muslim adalah bagian penduduk yang ber-beda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui Muhammad, putra Abdullah, men-jadi utusan Allah terakhir dan me-yakini ajarannya adalah benar, dan yang sering mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang ti-dak mempunyai keyakinan seperti itu<sup>8</sup>. Kettani menjelaskan muslim minoritas bisa terjadi karena beberapa sebab. Pertama, suatu komunitas diciptakan untuk tidak efektif sekalipun komunitas tersebut sebenarnya mayoritas dalam jumlah. Ini biasanya terjadi karena adanya pendudukan oleh kelompok lain yang memang pada akhirnya dikatakan Kettani akan merubah jumlah menjadi minoritas. Kedua, akibat kurang efektifnya penyebaran agama Islam sehingga tidak mampu mengubah muslim menjadi mayoritas. Masuk dalam kategori ini adalah adanya penguasaan yang tidak berlangsung lama sehingga begitu kekuasaannya tumbang muslim ikut menjadi minoritas. Ketiga, adanya

---

<sup>7</sup>Azyumardi Azra. 2005. "Wacana tentang Minoritas Muslim. Kata Pengantar *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. xx

<sup>8</sup>M. Ali Kettani. 2005. *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 3.

perpindahan agama dari non muslim menjadi muslim dan itu terjadi di negara non muslim. Kondisi ini harus didukung adanya kesadaran akan pentingnya keyakinan Islam mereka dan memberikan prioritas terhadap cita-cita muslim itu. Maka dengan demikian akan tercipta apa yang dinamakan muslim minoritas.

Tetapi, minoritas juga sering bersifat ekonomi. Dijelaskan oleh Kettani, menjadi kewajiban orang muslim untuk menyumbangkan uang, waktu, pengetahuan dan pengalaman untuk berfungsinya organisasi (muslim), pendirian masjid, dan pembangunan sekolah. Namun, orang-orang muslim belum sepenuhnya menyadari kewajiban ini dan tidak ingin tahu persoalan semacam itu, yang disebabkan masih lemahnya identitas muslim itu sendiri. Minoritas yang bersifat ekonomis ini, barangkali lebih mudah ditemukan di Indonesia karena masih banyaknya penduduk yang terhimpit kemiskinan.

Mason (1995:5) memaknai kelompok minoritas dilihat dari segi jumlah yang relatif kecil. Minoritas ditandai dengan angka, suara politik dan moral, sehingga ini semua me-

nyebabkan berkurangnya pengaruh terhadap keputusan mayoritas. Definisi ini mirip dengan definisi yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam *Special Rapporteur*, Francesco Capotorti bahwa minoritas adalah “*Agroup, numerically inferior in the rest of the population of a state, in a non dominant position, whose members-beeing national of the state-posses ethnic, religious or linguistics, differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, tradition, religion and language*”<sup>9</sup>

Ada dugaan kuat bahwa pada masyarakat minoritas akan terjadi kurangnya pelayanan terutama pelayanan pendidikan keagamaan. Bila dugaan ini benar tentu sangat memprihatinkan dimana Indonesia merupakan negara yang multi agama, etnis, suku dan bahasa. Harus ada upaya serius untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan (keagamaan) secara merata.

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya sama dengan pelayanan pada umumnya. Pelayanan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan; yaitu pekerjaan yang

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. 2005. *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, hh. 18-19.

dilakukan untuk orang lain. Ada juga yang memberi makna kegiatan melaksanakan tugas untuk membantu orang lain. Maka, kemudian, layanan dibedakan dengan produk, dimana produk, mengacu pada output seperti barang. Sementara pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan, yang berkaitan dengan sikap melayani seperti; memberi saran/informasi atau melayani pengobatan pasien. Dengan demikian, pelayanan merupakan dukungan yang diberikan bagi optimalisasi produk, perbantuan bagi pelanggan atau pengerjaan tugas lapangan.

Dalam penggunaannya, istilah pelayanan digunakan dalam konteks barang atau jasa. Feigenbaum mengistilahkannya dengan "*product service*". Jika demikian, pelayanan merupakan bentuk kegiatan yang diberikan oleh pihak tertentu baik itu individu, kelompok, perusahaan, organisasi maupun lembaga Pemerintah, kepada pelanggan dalam upaya memberikan bantuan atau kepuasan yang menjadi visinya. Dengan demikian, kualitas pelayanan merupakan atribut suatu kegiatan yang dilakukan oleh provider

kepada pelanggan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan.

Tapi, para ahli berbeda dalam merumuskan indikator kualitas pelayanan. Garvin (1994) misalnya, mengemukakan, ada delapan dimensi kualitas pelayanan (1) kinerja petugas (2) karakteristik unggulan layanan (3) kesesuaian layanan dengan spesifikasi (4) keterandalan petugas (5) daya tahan produk (6) Estetika atau pengalaman pelanggan tentang reputasi dan prestasi provider (7) kemampuan layanan dan (8) persepsi terhadap kualitas. Sementara, Parasuraman (1994) menyebut lima kriteria untuk menilai apakah kualitas layanan dapat disebut baik atau tidak. Yaitu (1) kekonkretan, yang menyangkut fasilitas fisik, perlengkapan, petugas dan sarana komunikasi (2) keterandalan, berkaitan dengan kemampuan dan ketepatan dalam memberikan layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan, (3) tanggap, yaitu kesigapan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan, (4) jaminan, yakni layanan yang mampu memberikan kepastian keamanan, kebebasan dari mara bahaya dan resiko lainnya, (5) empati, yakni memberikan kemudahan komunikasi, memberi perhatian (secara)

pribadi serta memahami petugas terhadap kebutuhan pelanggan.

Kesimpulannya adalah bahwa baik buruknya pelayanan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut *pertama*, lembaga itu harus memiliki keandalan. Yaitu kemampuan tenaga kependidikan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan. *Kedua*, lembaga harus memiliki daya tanggap; yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga tersebut secara cepat dan bermakna, mau mendengar dan mengatasi keluhan masyarakat pengguna. *Ketiga*, memiliki kepastian; yaitu bahwa tenaga administrasi dan karyawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. *Keempat*, secara kelembagaan memiliki rasa empati, yaitu semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. Dan *kelima*, bahwa fasilitas-fasilitas kependidikannya bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya.

Sebuah lembaga pendidikan keagamaan sebenarnya merupakan gabungan antara penyedia jasa dan

pelanggan. Kepala sekolah, guru, staf administrasi dan tenaga kependidikan lainnya adalah kumpulan pelayanan sedangkan orang tua murid dan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya adalah kumpulan pelanggan. Interelasi ini sulit dipisahkan satu sama lain karena sebuah lembaga pendidikan keagamaan pada hakekatnya gabungan keduanya yang harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi sebuah lembaga pendidikan keagamaan, terlebih lagi di era informasi saat ini, masyarakat bisa mendapat informasi dengan cepat tentang lembaga pendidikan mana yang baik dan bisa memberikan pelayanan dengan memuaskan.

Pelayanan yang baik, bermanfaat terutama untuk membangun citra lembaga. Citra lembaga pendidikan keagamaan akan naik ketika ia mampu memberikan layanan pendidikan dengan baik, dan sebaliknya. Dari sudut kepentingan pelanggan, layanan yang baik bisa memberikan kepuasan. Nilai kepuasan yang diperoleh pelanggan berakibat tumbuhnya keinginan untuk memasukkan atau menyekolahkan anaknya di masa mendatang. Di samping itu, secara psikomanagerial, bisa melahirkan situasi baru

yang mutualistik; tumbuhnya rasa dan sikap memiliki terhadap lembaga. Ini merupakan aset potensial bagi kelangsungan lembaga pendidikan keagamaan itu sendiri. Dari sudut manajerial, pelayanan yang baik berdampak besar terhadap kelancaran proses pengerjaan tugas yang pada gilirannya, menaikkan tingkat efektifitas dan efisiensi.

Perkembangan kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan keagamaan pada masyarakat minoritas tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muslim. Ini artinya kaum muslim merupakan pilar kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan di daerah minoritas. Pendirian lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas pada umumnya dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat (muslim) untuk secara leluasa mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Kesulitan yang paling terlihat adalah saat ada seorang muslim yang tinggal di suatu tempat dimana hanya ada satu keluarga atau sendiri yang beragama Islam, maka untuk menjalankan kewajibannya seorang muslim sangat terbatas. Ini menjadi sebab mengapa di lingkungan masyarakat minoritas menganggap begitu mendasarnya kehadiran lembaga pendidikan keagamaan. Di

samping itu terdapat faktor eksternal yang melatarbelakangi pendirian lembaga pendidikan keagamaan yaitu lingkungan yang mudah sekali mempengaruhi perkembangan anak-anak baik dalam bentuk perilaku, sikap maupun pengamalan agamanya. Maka upaya minimal yang harus dilakukan adalah menyediakan lembaga pendidikan keagamaan ini. Ada dua manfaat sekaligus yang bisa diperoleh; silaturahmi terjaga dan penanaman ajaran agama bisa dimulai.

Di wilayah tertentu yang menjadi pemicu berdirinya lembaga pendidikan keagamaan didorong oleh semakin banyaknya kaum muslim yang masuk dari luar wilayah yang bersangkutan. Perpindahan penduduk ini sulit dibendung seiring dengan kebutuhan daerah terhadap tenaga kerja dalam mengisi pembangunan di wilayahnya. Penyebab lain perpindahan penduduk karena dorongan faktor ekonomi, mengingat hingga saat ini sektor pertanian yang berada di pedesaan belum bisa mengimbangi dampak ekonomisnya dibanding sektor industri (yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan). Dalam konteks seperti ini tentu sulit membentuk arus perpindahan penduduk tersebut hingga negara mampu

secara ekonomis tersedia di masing-masing daerah. Kesulitan lain ditemukan untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang berlainan agama. Seleksi terjadi dengan sendirinya, dimana masyarakat muslim semakin menunjukkan identitasnya. Di saat seperti inilah pertemuan terjadi dan merasa memiliki kepentingan yang sama, sehingga mereka memerlukan wadah yang salah satu di antaranya adalah wadah bagi pendidikan keagamaan anak-anak mereka. Situasi seperti ini terjadi di lingkungan muslim minoritas tertentu seperti di Sumatera Utara, Manado, Bali. Tetapi seperti di Ambon, walaupun pemicunya tidak sama, yaitu konflik, pengelompokan antar agama juga terjadi secara tajam yang diduga keras juga akibat dari perpindahan penduduk.

Kondisi ini mempercepat perkembangan lembaga pendidikan keagamaan di daerah tersebut. Memang rata-rata masyarakat muslim tidak langsung mendirikan lembaga pendidikan keagamaan melainkan melalui wadah perkumpulan keagamaan. Di Sumatera Utara misalnya, terdapat Perkumpulan Kaum Muslim (PKM) yang secara nyata akibat dari banyaknya kaum muslim dari luar yang datang ke Tarutung. Tidak terbatas asal daerah mereka;

ada yang dari Tapanuli Selatan, Padang, dan Jawa. Awalnya, mereka membuat perkumpulan-perkumpulan berdasarkan asal mereka dan dari perkumpulan itu, mereka menyelenggarakan pengajian melalui lembaga semacam majelis taklim-majelis taklim. Kasus di Sumatera Utara, orang Jawa mendirikan perkumpulan Tunggal Wargo dilanjutkan dengan mendirikan majelis taklim Al-Muhajirin Tunggal Wargo untuk kaum laki-laki dan Tunggal Wargo Ibu untuk kaum perempuan. Orang Tapanuli Selatan mendirikan perkumpulan umat Islam Tapanuli Selatan dan majelis taklim dengan nama Kaum Bapak Tapsel untuk laki-laki dan kaum Ibu Tapsel untuk perempuan. Untuk muslim dari Padang, ada Perkumpulan Perantauan Minang (PPM). Seiring dengan diselenggarakannya majelis taklim berbasis kedaerahan, kaum pribumi muslim Tarutung juga mendirikan majelis taklim yang bernama Bona Pasogit. Saat penelitian dilakukan jumlah majelis taklim di Kecamatan Tarutung sebanyak 10 buah dengan 441 jamaah dan 33 tenaga pengajar, di kecamatan Pahae Jae sebanyak 2 buah dengan 75 jamaah dan 6 tenaga pengajar serta di Kecamatan Siborong-

borong sebanyak 3 buah dengan 130 jamaah dan 5 tenaga pengajar.<sup>10</sup>

Di Bali hampir sama, dimana masyarakat pendatanglah yang berperan menghidupkan lembaga pendidikan keagamaan. Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya lembaga pendidikan keagamaan Islam di Bali, tidak lepas dari peran dan kontribusi para pendatang beragama Islam dari Jawa, Madura, Makasar dan lain-lain yang datang ke Bali untuk mengais rezeki. Dengan terus datangnya para pendatang ke daerah Bali secara tidak langsung fungsi sosial lembaga Islam seperti masjid dan pesantren menjadi tempat persinggahan yang sangat penting. Seperti halnya fungsi lembaga al-Junaid dan al-Kaff di Singapura yang menjadi tempat singgah orang-orang Yaman yang datang ke Asia Tenggara, banyak pesantren dan masjid di Bali menjadi tempat singgah para pendatang dari Jawa dan Madura. Sambil belajar di pesantren mereka melirik peluang untuk mendapatkan kerja di Bali. Sebagian lain mengajar di pesantren atau menjadi petugas masjid untuk menunggu pekerjaan di tempat lain.

Memang akhirnya masjid dan pesantren menjadi tempat sosial-

sasi maupun tempat pertemuan antar kaum pendatang. Pada hari jum'at, masjid menjadi tempat penting untuk saling tukar pengalaman dan informasi. Sementara itu pesantren juga menjadi tempat yang aman bagi pendatang untuk membiasakan diri dengan budaya Bali sambil melihat peluang pekerjaan yang mungkin dapat dikerjakan. Akibatnya banyak orang Islam di Bali cenderung taat melakukan ibadah di masjid, karena ritual dijadikan sebagai media untuk memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Fenomena ini membuat subur lembaga-lembaga pendidikan Islam di Bali walaupun jumlah pemeluknya relatif sedikit. Mungkin orang merasa aneh bahkan orang Islam sendiri, jika ternyata di Bali terdapat 114 pesantren. Terkejut karena selama ini orang lebih mengenal Bali sebagai komunitas agama Hindu. Julukan "Pulau Dewata" mengisyaratkan bahwa Hindu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya orang Bali. Ritual dan perayaan agama Hindu seperti perayaan Nyepi, Galungan, Kuningan dan tarian Kecak menjadi sajian pariwisata yang menarik di Bali. Ba-

---

<sup>10</sup> Data Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Utara melalui laporan HHB.

ngunan pura dan patung-patungnya menjadi ciri khas bangunan rumah Bali. Tidak dinyana ternyata di Bali terdapat pesantren yang tergolong banyak, lebih dari seratus buah. Suatu fenomena menarik untuk dilihat mengingat jumlah orang muslim di Bali yang relatif sedikit.

Di Manado (kasus Bitung) kemunculan lembaga pendidikan keagamaan sebenarnya lebih nampak diwarnai oleh organisasi keagamaan yang walaupun intinya juga masyarakat pendatang. Akan tetapi, identitas sebagai masyarakat pendatang sudah tidak terlalu kelihatan karena mereka sudah menetap lebih dari satu dasawarsa. Yang nampak justru identitas organisasinya. Al Khaerat dan Hidayatullah misalnya, adalah dua lembaga pendidikan keagamaan yang kental nuansa organisasinya. Lembaga lainnya belum memiliki akar kuat di masyarakat. Terdapat lima Madrasah Diniyah kategori kedua ini dimana mereka melangsungkan kegiatannya di rumah guru dan mushala. Namun demikian, ketika ditelusuri lebih jauh para pendiri lembaga inipun berbasis organisasi seperti Muhammadiyah, seperti MD As Shakirin yang didirikan Drs Ismail dan MD Uswatun Hasanah yang didirikan Sahma Sanusi di bawah naungan

Aisiyah. Kesimpulannya bahwa secara kelembagaan kehadiran lembaga pendidikan keagamaan di Manado sangat kuat warna organisasi keagamaannya.

Sementara di Jawa, belum ditemukan adanya perbedaan yang menyolok antara satu wilayah dengan lainnya. Perlu dijelaskan, untuk wilayah Jawa dalam kajian ini menempatkan masyarakat minoritas dalam pengertian minoritas ekonomi. Artinya, di Jawa sangat sulit mencari masyarakat minoritas muslim yang berada dalam satu wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, kehadiran lembaga pendidikan keagamaan pada masyarakat minoritas di Jawa lebih nampak pada kelemahan kelembagaan.

Di Kalimantan Barat dilihat dari persebaran umat Islam khususnya di Kabupaten Landak menunjukkan persebaran yang tidak merata. Dari 10 kecamatan di Kab. Landak hanya ada 2 kecamatan yang hampir seimbang antara jumlah penduduk umat Islam dengan jumlah penduduk pemeluk agama Katolik dan Kristen, yaitu: Kec. Ngabang Ibukota Kab. Landak dan Kec. Sebangki. Tapi delapan kecamatan lainnya jumlah umat Islam hanya sebagian kecil, yaitu

sekitar 10 % dari jumlah pemeluk agama Katolik dan Kristen. Kondisi persebaran umat Islam tersebut, berakibat kepada tokoh-tokoh masyarakat Islam umumnya terkonsentrasi di Kec. Ngabang dan Kec. Sebangki, sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya hampir tidak memiliki tokoh-tokoh masyarakat muslim yang dapat dijadikan sebagai panutan dan tumpuan bertanya, terutama dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan.

Lembaga pendidikan keagamaan, seperti: Madrasah Diniyah sebagian besar (87 %) berada di Kec. Sebangki dan selebihnya berada di Kec. Ngabang. Kecamatan lainnya belum memiliki Madrasah Diniyah. Juga TPA/TKA, demikian juga majelis taklim dan pondok pesantren sebagian besar berada di Kec. Ngabang dan Kec. Sebangki. Begitupun MIN dan MIS sebagian besar (76 %) berada di Kec. Sebangki, 20 % di Kec. Ngabang dan hanya sebagian kecil (sekitar 4 %) berada di kecamatan lainnya. Demikian pula halnya MTs dan MA hampir sebagian besar berada di Kec. Ngabang dan Kec. Sebangki. Akibat dari itu semua lembaga pendidikan keagamaan di daerah ini, selain cenderung diselenggarakan apa adanya

(pelayanannya belum terprogram dengan baik), juga sebarannya kurang merata ke seluruh desa atau kecamatan, padahal pada setiap desa atau kecamatan terdapat umat Islam, meskipun jumlahnya kecil. Umumnya umat Islam termasuk tokoh-tokohnya memandang bahwa lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal (TKA/TPA, madrasah diniyah, majelis taklim dan pondok pesantren), dari segi jumlah (kuantitasnya) masih kurang, jika dibanding dengan kebutuhan umat Islam. Juga dari segi kualitasnya masih rendah, sehingga belum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan umatnya tentang ajaran Islam. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa hampir sebagian besar umat Islam (anak-anak sampai dewasa dan orangtua) di daerah ini masih sangat awam terhadap ajaran Islam. Untuk mengatasi masalah ini, para tokoh masyarakat Islam merencanakan akan memfungsikan secara maksimal masjid atau mushalla sebagai salah satu lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Namun, masih menghadapi masalah terutama dalam hal data tentang berapa jumlah umat Islam yang belum atau dapat membaca al Qur'an dan data lainnya.

## Temuan

Pelayanan pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang dalam hal ini pengelola pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan sikap melayani seperti memberi saran atau informasi. Dengan demikian, pelayanan pendidikan keagamaan merupakan perbantuan bagi pelanggan dalam hal ini masyarakat minoritas muslim.

Baik buruknya pelayanan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1) lembaga pendidikan keagamaan harus memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. 2) lembaga pendidikan keagamaan harus memiliki daya tanggap yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga secara cepat dan bermakna. 3) memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karyawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. 4) secara kelembagaan, lembaga pendidikan keagamaan memiliki

rasa empati yaitu semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. 5) fasilitas-fasilitas kependidikan juga bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya.

Lembaga pendidikan keagamaan merupakan gabungan antara penyedia jasa dan pelanggan. Karena lahirnya lembaga pendidikan keagamaan berasal dari umat, untuk umat, dan oleh umat. Kepala, guru, staf administrasi adalah kumpulan pelayanan, sedangkan orang tua murid, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya adalah kumpulan pelanggan. Jika kita melihat fenomena lahirnya lembaga pendidikan keagamaan, sulit dipisahkan satu sama lain karena misalnya seorang kepala atau guru di samping sebagai penyedia layanan, juga pengguna jasa tersebut karena anaknya belajar di lembaga bersangkutan. Meskipun tidak mudah untuk membedakan siapa penyedia layanan dan siapa pengguna jasa dalam kasus pelayanan pendidikan keagamaan, indikator-indikator baik buruknya sebuah pelayanan sebagaimana telah disebutkan dapat menjadi alat analisa.

*Pertama*, dikatakan baik pelayanan pendidikan keagamaan jika memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. Profil tenaga guru di lembaga pendidikan keagamaan wilayah penelitian menunjukkan masih sangat kurang, misalnya ada yang baru memiliki 2 tenaga atau 3. Tenaga yang hanya 2 atau 3 ini-pun jika ditelusuri lebih jauh merupakan tenaga sukarela yang secara kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan pendiri lembaga pendidikan. Artinya, masih terdapat kekurangan mendasar dilihat dari sisi jumlah tenaga kependidikan. Dari sisi kualitas, terutama jenjang pendidikan, sudah banyak guru di lembaga pendidikan keagamaan yang berpendidikan tinggi. Tetapi mereka bukan berasal dari perguruan tinggi agama seperti IAIN, STAIN atau pondok pesantren. Mereka merupakan tenaga-tenaga yang secara emosional tertarik untuk menyumbangkan ilmu dan tenaganya demi pendidikan keagamaan anak-anak mereka.

Seberapa besar ketercukupan dan keandalan tenaga guru tersebut di masing-masing lembaga dalam melayani pendidikan anak didiknya. Masyarakat menilai, keadaan guru

di lembaga pendidikan keagamaan masih kurang, akibatnya pelayanan pendidikan tidak terpenuhi. Seharusnya ada semacam spesialisasi guru, misalnya, ada guru pelajaran nahwu dan sharaf. Masyarakat mengusulkan adanya penambahan guru tetap karena sebagian besar guru adalah memiliki kegiatan di tempat ia lain sehingga mengajar di lembaga pendidikan keagamaan menjadi sampingan.

Tentang bagaimana ketercukupan dan keandalan tenaga guru, masyarakat menilai keadaan guru belum cukup tetapi tenaga pendidik sudah bisa melayani pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan keagamaan belum terpenuhi. Belum cukupnya tenaga guru juga disampaikan para orang tua murid. Para orang tua murid menginginkan adanya kecukupan tenaga sehingga mereka (orang tua) bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak lembaga. Sementara ini komunikasi belum berjalan sebagaimana diharapkan karena masing-masing guru terlalu berorientasi pada pembelajaran.

*Kedua*, dikatakan baik pelayanan pendidikan Madrasah Diniyah jika memiliki daya tanggap, yaitu kemampuan tenaga administrasi dan

atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga secara cepat dan bermakna. Di seluruh wilayah penelian, belum ditemukan peran khusus yang diposisikan sebagai tenaga administrasi. Dalam kondisi demikian, masih belum bisa menangkap dan merespon perkembangan yang cepat di masyarakat. Yang penting bagi lembaga baru pada taraf penyelenggaraan pendidikan. *Ketiga* pelayanan dikatakan baik jika pendidikan memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karyawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. Dari sisi ini sebenarnya pelayanan pendidikan keagamaan dapat dikatakan sudah baik. Artinya, apa yang diberikan lembaga pendidikan keagamaan, misalnya penanaman aqidah sudah diberikan dengan baik. Begitu juga dengan indikator *keempat* yang mengatakan pelayanan dapat dikatakan baik ketika semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. Dalam hal ini beragam keadaan. Di Sumatera Utara karena lembaga pendidikan

keagamaan berada dalam satu komunitas sehingga keterlibatan nampak intens. Tapi di wilayah lain belum menunjukkan demikian.

Indikator *kelima* adalah jika fasilitas-fasilitas kependidikan bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya. Umumnya para orang tua murid mengatakan bahwa untuk daerah minoritas, fasilitas-fasilitas kependidikan sudah memadai. Namun, mereka berusaha bersama-sama dengan penyelenggara untuk menambah ruang belajar, menambah ruang mushola, melengkapi fasilitas buku pelajaran dan merenovasi ruang-ruang yang sudah rusak.

## KESIMPULAN

Sebagaimana yang ingin dicari berdasarkan tujuan penelitian, ditemukan kondisi sebagai berikut :

1. Implementasi pendidikan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah maupun pesantren adalah atas prakarsa masyarakat muslim dalam rangka memajukan generasi penerus umat Islam. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang secara agama kuat dilihat dari latar belakang pendidikan dan atau organisasi keagamaan,

masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren, PTAI, PGA, Aliyah, memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap kondisi pendidikan agama generasi penerus, sehingga mereka rela mengabdikan ilmu dan tenaganya di lembaga pendidikan keagamaan. Demikian juga masyarakat yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Alkhaerat, dan sebagainya, juga memiliki kecenderungan yang sama.

2. Bentuk bentuk pelayanan pendidikan keagamaan di daerah minoritas terbagi ke dalam tiga bentuk TKA/TPA, Madrasah Diniyah dan pondok pesantren.
3. Jenis pelayanan pendidikan keagamaan yang diberikan berkisar pada baca-tulis Al-Quran, belajar sholat, do'a sehari-hari (TPA), Fiqih, Aqidah-Akhlak, Tarikh Islam, Bahasa Arab (pesantren).
4. Harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan lebih terfokus pada peningkatan kualitas. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas berjalan

apa adanya. Artinya, kondisi tenaga pengajar, fasilitas, bahan ajar, media pembelajaran dan sebagainya dalam kondisi serba tidak mencukupi.

5. Hambatan yang dihadapi baik oleh penyelenggara maupun Departemen Agama di Kabupaten/Kota adalah sulitnya mendapat dukungan bahan ajar yang aplikatif seperti video memandikan jenazah, video menyolatkan jenazah, video praktek shalat dan sebagainya. Temuan ini menonjol karena kondisi ketenagaan yang ada masih sangat rendah. Hambatan lain yang dihadapi adalah masih sulitnya membangun komunikasi secara seimbang antara mayoritas dan minoritas. Padahal pelayanan pendidikan keagamaan di lingkungan minoritas merupakan pelayanan dalam kategori spesifik dalam arti harus mampu melayani secara baik terhadap masyarakat minoritas dan pada saat yang sama juga harus mampu menanamkan perasaan rela bagi mayoritas terhadap kehadiran dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

## SUMBER BACAAN

- Abdullah, Mal An dkk (2003): *Laporan Penelitian, Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah*. Jakarta, Puslitbang Penda dan Keagamaan Balitbang Depag.
- Badan Litbang dan Diklat (2005): *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*. Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Bungin, Burhan (2005): *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikatif*. Jakarta, Rajawali Persada, Jakarta.
- Creswell, John W (1994): *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. USA, Sage Publication, Inc.
- Kettani, M. Ali (2005): *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nottingham, Elisabeth K (1985): *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong. Jakarta, CV Rajawali, hh. 31-69, dalam Dr. H. Dadang Kahmad (2002): *Sosiologi Agama*. Bandung, PT. Remaja Rosda.
- Prasetyo Bambang, Jannah Lina M (2005): *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Jakarta, Rajawali Persada.
- Rosyada, Dede (2005): *Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah Workshop Pengembangan Pendidikan Keagamaan, 27 Juli 2005. Jakarta, UIN.
- Suganda, Yulia (2002): *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sularto St (2001): *Masyarakat Warga dan Pergulatan demokrasi, Menyambut 70 Tahun Yacob Oetama*. Jakarta, Gramedia.
- Umaedi (2005): *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Keagamaan*, Makalah Workshop Pengembangan Pendidikan Keagamaan, 27 Juli 2005. Jakarta, UIN.